

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi adalah cara bagi organisasi untuk membantu mengatur dan menganalisa data menjadi informasi bermanfaat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saat ini, sistem informasi di suatu perusahaan atau organisasi terus berkembang. Jika dulu sistem informasi masih sistem tradisional, sekarang sudah terkomputerisasi untuk menjalankan semua proses bisnis yang terjadi dan menggunakan komputer untuk membantu implementasinya. Dengan berkembangnya sistem informasi, setiap perusahaan atau organisasi berusaha menciptakan sistem informasi yang bermanfaat untuk proses bisnisnya (1).

Dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan kesehatan di daerah, Puskesmas sebagai pelaksana kesehatan di tingkat terendah perlu dikelola secara efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana pelaksanaannya. Pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kebutuhan ketersediaan informasi terkait Puskesmas, disediakanlah suatu sistem informasi manajemen yang berbasis layanan Puskesmas. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Kebijakan Menteri Kesehatan No. 128/Menkes/SK/II/2004 menyebutkan bahwa azas penyelenggaraan Puskesmas mengupayakan untuk melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (2).

Sistem informasi manajemen Puskesmas merupakan suatu sistem informasi yang dapat memproses pengumpulan dan pengolahan data, yang dapat dianalisa menjadi informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan Puskesmas. Puskesmas memperoleh data dari pelayanan medis yang dilakukan oleh Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Posyandu (3). Dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dalam pelayanan Puskesmas, diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pelayanan, serta memperoleh data dan informasi yang akurat. Harapannya Sistem Informasi Manamejem di Puskesmas dapat meningkatkan pengolahan terkait data dan informasi Puskesmas dengan lebih efektif dan efisien (2).

Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem informasi kesehatan berjenjang atau bertahap. Sistem Informasi Kesehatan Nasional ini nanti akan digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambil keputusan dalam melaksanakan rencana kesehatan (2).

Saat ini Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembuatan rencana kesehatan. Masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, seperti kegiatan pengelolaan data dan informasi yang belum menjadi suatu

kesatuan yang utuh dan terkoordinasi dengan mekanisme yang baik, tumpang tindih dalam pendataan dan pengolahan data kesehatan, serta pendataan berulang oleh unit yang berbeda (4).

Pada umumnya implementasi program sistem informasi saat ini masih memiliki basis data masing – masing. Dalam hal ini, jika pengguna membutuhkan informasi atau kebutuhan data dari sumber yang berbeda akan sulit untuk memenuhi kebutuhan informasi yang kompleks yang harus menghubungkan dua atau lebih basis data. Selain kemungkinan masalah konsistensi dan akurasi data, situasi ini juga akan mengakibatkan proporsi biaya manajemen yang lebih besar di institusi pelayanan kesehatan. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada terhambatnya kinerja pelayanan publik. Adanya hambatan dalam mengakses data pada sistem yang tidak terintegrasi, menjadi kendala dalam kebutuhan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat sulit dilakukan (4).

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah atau kota dapat dengan leluasa menggunakan sistem informasi yang dibutuhkan oleh daerah atau kota masing – masing. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2012, Sistem Informasi Manajemen Informasi Puskesmas (SIMPUS) DI Yogyakarta dikembangkan oleh pihak eksternal dari suatu badan usaha atau bisnis yang berbeda menggunakan produk program komputer yang berbeda. 37% Puskesmas menggunakan aplikasi SISFOMAS (45 Puskesmas), 34% Puskesmas menggunakan aplikasi IHIS (41 Puskesmas), 12% Puskesmas menggunakan aplikasi MedCis (15 Puskesmas), dan 11% Puskesmas menggunakan aplikasi e-health (13 Puskesmas), 4% Puskesmas menggunakan aplikasi Jojok (5 Puskesmas), dan 2% menggunakan aplikasi Simpus lain (2 Puskesmas) (5).

Desentralisasi sektor kesehatan dapat berdampak negatif pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Pelaksanaan sistem informasi kesehatan nasional mengalami kendala, antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaporan SP2TP atau SIMPUS, SP2RS dan data kumpulan informasi kesehatan. Dengan adanya penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena minimnya kebijakan mengenai standar pelayanan kesehatan serta data dan informasi, pandangan masing-masing pemerintah daerah berbeda. Hal ini pula yang menyebabkan pembangunan Sistem Informasi Kesehatan yang tidak terstandar, data variabel dan format yang berbeda, sistem dan aplikasi bawaan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Di Kementerian Kesehatan pun belum menyusun sistem informasi standar, sehingga setiap program dapat membangun sistem informasinya sendiri dengan menggunakan sumber data dari daerah, kota atau provinsi (6).

Karena keadaan ini, data yang dihasilkan dari setiap daerah tidak konsisten, beberapa data tidak lengkap, dan terdapat data tentang variabel yang

sama pada sistem informasi program kesehatan, yang berbeda dengan data sistem informasi program kesehatan lainnya. Oleh karena itu, validitas dan keakuratan data patut dipertanyakan, terlebih jika validasi data tidak dilakukan. Ditambah dengan lambatnya transmisi data ke Departemen Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, informasi yang diterima tidak lagi terbaru, serta proses pengolahan dan analisis data juga terhambat. Terakhir, pengambil keputusan atau pemangku kepentingan tidak membuat keputusan dan kebijakan kesehatan berdasarkan data yang akurat (6).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kebutuhan akan sistem informasi pada Puskesmas sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan format *PICO (Participant-Intervention-Comparison-Outcomes)*. P: Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan O: *Platform* dan manfaat *platform* yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi. Sehingga rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya adalah:

- a. Apa perangkat yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Indonesia?
- b. Apa manfaat dari perangkat yang dipakai untuk pengembangan sistem informasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui *platform* yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas.
- b. Mengidentifikasi manfaat dari penggunaan *platform* yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Teoritis

Penulis berharap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi baru dalam pengembangan ilmu.

1.4.2 Bagi Praktisi

Penulis berharap dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Indonesia.